



Pengundian Lapak Dinilai Tak Adil

■ Pedagang Teras Malioboro 2 Datangi Kantor DPRD Kota Yogya

YOGYA, TRIBUN - Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 yang tergabung dalam Paguyuban Tri Dharma, menyambangi Gedung DPRD Kota Yogya, Senin (6/1). Melalui aksi yang diwarnai dengan pembentangan deretan spanduk dan poster bernada protes itu, para pedagang mengadu soal proses pengundian lapak yang dinilai tidak fair.

Sebagai informasi, pada awal 2025 ini, seluruh pedagang yang menempai Teras Malioboro 2 bakal direlokasi menuju lapak atau bangunan baru di kawasan Beskalan dan Ketandan. Pengundian lapak untuk para pedagang yang mendapat jatah di Ketandan, sudah dilakukan pada 31 Desember 2024 lalu, meski belum seluruhnya.

Ketua Paguyuban Tri Dharma, Supriyati menuturkan, dari total 1.041 pedagang Teras Malioboro 2, baru sekitar separuhnya yang mendapat undangan pengundian. Namun, sebagian pedagang yang sudah mengikuti pengundian oleh UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya pun merasa kurang puas dengan hasil yang didapat.

"Beberapa anggota kami yang merasakan sudah mengambil undian itu merasa seperti sudah di-setting (diatur) duluan undiannya," kata Supriyati.

Kecurigaannya pun semakin mengerucut, karena undangan pengundian untuk pedagang dari UPT terbagi dalam dua sesi, pada pagi dan siang hari. Menurutnya, lapak-lapak yang berlokasi di tempat strategis, atau lantai satu, sudah dihabiskan oleh para pedagang yang mendapat undangan lebih awal.

"Kami juga sudah membawa saksi berjumlah 10 orang. Mereka menyatakan, bahwa undangan yang jam 08.00-10.00 dapat lantai

TUNTUT TRANSPARANSI

- Ratusan pedagang Teras Malioboro 2 protes dengan pengundian lapak yang dinilai tidak adil.
- Proses pengundian seperti sudah diatur agar sejumlah pedagang mendapat lapak di lantai satu.
- Pedagang berharap intervensi dari legislatif, agar proses pengundian bisa lebih transparan.
- Komisi D akan segera melakukan langkah lebih jauh guna mengatasi permasalahan ini.

satu, kemudian yang di atas jam 10.00 itu di lantai dua semua," terangnya.

"Seperti sudah di-setting. Makanya, walaupun kita berdoa, bersalawat, kalau jamnya jam 10.00 ke atas undangannya otomatis lantai dua," urai Supriyati.

Ditambah lagi, sebagai perwakilan paguyuban, dirinya belum pernah mendapat undangan, mulai dari proses sosialisasi, urun rembuk, dan lain sebagainya. Termasuk saat pengundian, dua lapak yang ditempatinya untuk mengals rezeki atas nama ayah dan ibunya, belum pernah dikirim undangan oleh UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya.

"Masih banyak, ada sekitar 400-500 pedagang yang belum mendapat lapak (di Ketandan). Kebanyakan dari anggota kami belum mendapatkan undangan," ungkap-

nya. Oleh sebab itu, pihaknya pun berharap intervensi dari legislatif, agar proses pengundian yang diklaimnya sarat kontroversi dapat dihentikan. Paguyuban Tri Dharma mendorong dilangsungkannya pengundian ulang yang lebih transparan, sekaligus memenuhi prinsip-prinsip keadilan untuk seluruh pedagang.

"Itu jelas-jelas kami tuntutan, agar sesegera mungkin DPRD Kota Yogya menghentikan proses pengundian dan dilakukan pengundian ulang," pungkasnya.

Koordinasi

Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kota Yogya, Triyono Hari Kuncoro siap merespons keluhan-keluhan yang disampaikan para pedagang. Pihaknya segera menginstruksikan Komisi D yang bermitra dengan Dinas Kebudayaan dan UPT Pengelola Kawasan Cagar Budaya, untuk melakukan langkah lebih jauh.

"Kita akan koordinasikan dengan pimpinan yang lain, karena di lembaga dewan itu pimpinan kolektif kolegial, harus atas kesepakatan bersama," katanya.

Meski demikian, politikus PKS itu menyebut, problem semacam ini merupakan bagian dari dinamika relokasi pedagang menuju lapak baru di kawasan Ketandan dan Beskalan. Namun bagaimanapun juga, ia berharap pihak eksekutif dalam mengulirkan seluruh tahapan bisa benar-benar transparan yang berujung pada win-win solution.

"Sebenarnya mekanisme UPT yang ditempuh seperti apa kan kita belum dapat laporan juga. Nanti akan kita cross check dengan pihak sana dulu, biar persoalannya ketemu, masalahnya di mana," cetusnya.

"Nanti langkah itu kita minta Komisi D yang melakukan, karena langsung bermitra dengan UPT, yang secara kelembagaan bisa memanggil untuk mendalami informasi yang dikeluarkan (pedagang)," pungk-

Kuncoro, (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005